

**PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE*  
*GOVERNANCE* TERHADAP LUAS  
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL*  
*RESPONSIBILITY***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI  
Tahun 2011-2013)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**GRAND MAHENDRA NAPITUPULU  
NIM. 12030111140254**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2015**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Grand Mahendra Napitupulu  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140254  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)**  
Dosen Pembimbing : Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 7 Juli 2015

Dosen Pembimbing,

(Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.)

NIP : 19760522 200312 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Grand Mahendra Napitupulu  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140254  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 7 Juli 2015**

Tim Penguji

1. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Grand Mahendra Napitupulu, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis lainnya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 7 Juli 2015  
Yang membuat pernyataan,

Grand Mahendra Napitupulu  
NIM : 12030111140254

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013. Karakteristik *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah komisararis independen, komite audit, kepemilikan publik, dan kepemilikan asing.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013. Total sampel penelitian ini adalah 102 laporan tahunan perusahaan manufaktur yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menganalisis pengungkapan CSR pada laporan tahunan dengan metode *content analysis*. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisararis independen, kepemilikan publik, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility (CSR)*, karakteristik *corporate governance*, komisararis independen, komite audit, kepemilikan publik, kepemilikan asing.

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the influence of corporate governance characteristics to corporate social responsibility disclosure (CSR Disclosure) in annual reports of manufacturing companies that listed on the Indonesia Stock Exchange in the year 2011-2013. Characteristics of corporate governance used in this study is independent commissioners, audit committee, public ownership, and foreign ownership.*

*The population of this study are all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the year 2011-2013. Total sample is 102 annual report of manufacturing companies as determined by purposive sampling method. This research analyzes CSR disclosure in annual reports by the method of content analysis. Data analysis was performed with the classical assumption and hypothesis testing of regression method.*

*The results of this study indicate that independent commissioners, public ownership, and foreign ownership did not have significant influence to the CSR disclosure. Audit committee has significant influence to CSR disclosure.*

*Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), corporate governance characteristics, independent commissioners, audit committee, public ownership, foreign ownership.*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka (Mazmur 34:8)*

*Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu (Matius 7:7)*

*“Knowing is not enough, you must apply. Willing is not enough, you must do.”  
(Bruce Lee)*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

Tuhan Yesus Kristus  
Mama, Bapak, dan Gabriel  
Seluruh keluarga besar Akuntansi 2011  
serta saudara-saudara PMK FEB UNDIP

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan perhatian, arahan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
4. Alm. Dr. H. Sugeng Pamudji, M.Si., Akt. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis walaupun tidak sampai akhir penyusunan skripsi ini.

5. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali pengganti yang telah membimbing penulis sampai akhir penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
7. Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah membantu penulis selama proses studi.
8. Keluarga yang selalu ada di hati, Bapak Nasib Napitupulu, Mama Hotmaida Manurung, dan Gabriel Mario Novendra Napitupulu atas doa, nasihat, perhatian, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. PMK Ekonomi FEB UNDIP yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk dapat merasakan arti kekeluargaan, keceriaan, dan kebersamaan selama di Semarang. Doa dan dukungan kalian semua sangat berarti bagi saya.
10. PMK Ekonomi Angkatan 2011: Doly, Tian, Ardi, Ucup, Melvin, Yonatan, Debby, Ricko, Samuel, Abram, Claudia, Santa, Mindo, Paskah, Lina, Yehezkiel, Eliana, Amel, Tia, Nola, Prawira, Paguh, Ester, Ana, Juli, Randy Marbun, Gio, Daniel, Mitra, Putri, Naomi, Lastri, Yessi, Bramasido, Citra, Mariati, Mustika, Lois, Liese, Rani, Paul, Crissy, Moses, Tasya, David, Axel, Ega, Wisnu, Cita, Joseph, Siwi, Roy. Terima kasih atas doa, nasihat, dukungan, dan kebersamaan selama ini. Semoga kita semua lulus pada waktu yang tepat. Tetap semangat dan kompak. Sukses selalu buat kita.

11. Saudara terkasih dan teman spesial: Rexy dan Ayu. Terima kasih buat perhatian, pengertian, nasihat, doa dan motivasi yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
12. Saudara kelompok kecil PMK FEB UNDIP: Ondy, Diori, Evans, Bang Togi, dan Bang Piter yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
13. Keluarga besar Sonak Malela: Rima, Dion, Ruth, Liley, Yolanda, Widya, Ferry untuk semua nasihat dan dukungan yang telah diberikan.
14. Teman-teman kostan Barry's House: Febri, Bastian, Kicay, Aldo, Rudi, Mas Aan, Bahar, Girlbert, Richard, Thomson, Alex, Kevin, Frans, Wanri, Harry, Leo, Master, Victor, Bang Amos, Daud.
15. Teman-teman satu bimbingan: Randy, Nurul, Uswah, Yaya, Fani, Carles, Philip, Stephanus, Raymond, Hermas, Hanif, Ical, Bani yang telah membantu, memberi masukan, dan berjuang bersama dalam penyusunan skripsi ini.
16. Tim KKN Desa Sukodono: Panji, Devina, Rio, Mas Guno, Tasha, dan Anggun buat kebersamaannya selama ini. Senang bisa mengenal kalian walau hanya sebentar.
17. Keluarga Besar Akuntansi 2011 untuk kebersamaan selama hampir 4 tahun ini. Semoga kita sukses dan tetap kompak.
18. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat berharap atas saran dan kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 7 Juli 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ) .....	11
2.1.2 Teori Legitimasi .....	13
2.1.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	15
2.1.4 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	16
2.1.5 Tata Kelola Perusahaan .....	18
2.2 Penelitian Terdahulu .....	22
2.3 Kerangka Pemikiran .....	24
2.4 Hipotesis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	33
3.1.1 Variabel Dependen .....	33

3.1.2 Variabel Independen .....	34
3.2 Populasi dan Sampel .....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	37
3.5 Metode Analisis Data .....	37
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	37
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	37
3.5.2.1 Uji Normalitas .....	38
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas .....	39
3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas .....	39
3.5.2.4 Uji Autokorelasi .....	40
3.5.3 Analisis Regresi Berganda .....	40
3.5.4 Uji Hipotesis .....	41
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi .....	41
3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	42
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter (Uji t) .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Deskripsi dan Obyek Penelitian .....	44
4.2 Analisis Data .....	44
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	45
4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	48
4.2.2.1 Uji Normalitas .....	48
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas .....	49
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas .....	51
4.2.2.4 uji Autokorelasi .....	52
4.3 Analisis Regresi Berganda .....	53
4.4 Uji Hipotesis .....	55
4.4.1 Uji Koefisien Determinasi .....	55
4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	56
4.4.3 Uji Signifikan Paramater Individual (uji t) .....	57
4.4.4 Hasil Pengujian Hipotesis .....	58
4.5 Intepretasi Hasil .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan .....	66
5.2 Keterbatasan .....	68

5.3 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 4.1 Sampel Penelitian .....	44
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Data Penelitian .....	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Multivariate .....	49
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas .....	50
Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi .....	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi .....	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Simultan .....	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	27
Gambar 4.1 Uji Asumsi Heterokedastisitas .....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia berkembang semakin pesat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan di Indonesia baik yang swasta maupun Badan Umum Milik Negara (BUMN). Perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan, pengangguran menurun sehingga Produk Domestik Bruto meningkat. Namun, perusahaan juga tidak dapat terlepas dari lingkungan sosial sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Aktivitas-aktivitas ekonomi perusahaan telah mengakibatkan munculnya berbagai masalah lingkungan seperti limbah dan polusi pabrik, krisis ekologi, eksploitasi sumber daya alam, serta kerusakan lingkungan yang memberikan dampak buruk bagi keseimbangan hidup manusia (Kompas, 15 Januari 2014). Untuk mengurangi dampak tersebut, maka muncul konsep *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan.

Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai komitmen dan kerjasama antara karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan bukan lagi

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja, melainkan berpijak pada *triple bottom lines*, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan (Rustiarini, 2011).

Lingkungan ekonomi saat ini ditandai oleh fenomena globalisasi dan saling ketergantungan antara lingkungan dan pengakuan pembangunan. Keterkaitan antara CSR dan pendekatan pembangunan berkelanjutan harus menjadi bagian yang berintegrasi dalam konsep-konsep ekonomi yang digunakan untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, cadangan sumber daya alam, dan kemajuan sosial. Kesadaran perusahaan atas pentingnya CSR ini dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kepentingan terhadap pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga mempunyai kepentingan terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) seperti pelanggan, karyawan, *supplier*, komunitas, pemilik atau investor, dan juga *competitor*. Konsep ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability*) bagi perusahaan (Daniri, 2008).

Konsep CSR telah muncul sejak tahun 1970-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) lebih dulu, namun di kalangan masyarakat saat ini lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti Aneka Tambang, Djarum, Telkom, Semen Indonesia, dan perusahaan lainnya melakukan kegiatan CSR dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai program rutin tahunan

mereka. Wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan secara umum yaitu: pemberian pelatihan bagi karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, penanaman bibit pohon (*replantation*), pemeliharaan lingkungan di sekitar pabrik, dan penyediaan air bersih di lingkungan yang kering.

Menurut Utama (2007) praktik pengungkapan CSR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap perkembangan perusahaan-perusahaan transnasional atau multinasional yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, hal ini juga terkait dengan isu kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia seperti penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Berbagai kasus pencemaran lingkungan seperti yang terjadi pada kasus Freeport di Papua dan Newmond di Nusa Tenggara banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi telah memberikan pelajaran bagi perusahaan-perusahaan untuk lebih peduli dengan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Munculnya CSR merupakan faktor penting bagi banyak perusahaan yang ingin berhasil dalam bisnisnya. Dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri. Menurut Said, *et.al.* (2009), keterlibatan dalam CSR membantu perusahaan untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, menjaga *image* dan reputasi perusahaan, meningkatkan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan tempat kerja yang terbaik, meningkatkan

penjualan dan loyalitas pelanggan, meningkatkan hubungan investor yang lebih baik serta aliran masuk modal.

Praktik dan pengungkapan CSR tidak dapat terlepas dari penerapan *Good Corporate Governance*. Penerapan GCG dan pengungkapan CSR dilakukan untuk peningkatan kinerja perusahaan. Menurut Said, *et.al.* (2009), *corporate governance* sangat efektif dalam memastikan bahwa kepentingan *stakeholders* telah dilindungi. Perusahaan harus melaporkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan kepada *stakeholders*. Manajemen puncak bertanggung jawab dalam memastikan apakah sistem pengendalian sudah tepat, khususnya dalam pemantauan risiko, termasuk di dalamnya kewajiban sosial dan lingkungan. Khan (2010) menyatakan tata kelola perusahaan adalah proses para dewan dan auditor mengelola tanggung jawab mereka kepada penanam modal dan *stakeholder* lain. Mekanisme GCG akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders* (Waryanto, 2010).

Berdasarkan pedoman GCG di Indonesia, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Fungsi pengawasan ini diperkuat dengan adanya dewan komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris karena dewan komisaris independen berasal dari pihak yang tidak terafiliasi sehingga lebih bersifat independen dalam pengawasan. Dengan adanya pengawasan ini dapat menjamin bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (investor) dan semua informasi yang dimiliki

perusahaan, termasuk informasi tentang pengungkapan CSR akan diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2009) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, namun penelitian Khan (2010) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR.

Pelaksanaan tugas dewan komisaris dibantu oleh beberapa komite, salah satunya adalah komite audit. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam aspek pengendalian/pengawasan perusahaan. Menurut Said, *et.al.* (2009), peran komite audit adalah meninjau proses perusahaan dalam menghasilkan data keuangan dan pengendalian internal sehingga keberadaannya dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Handajani (2009) menemukan bahwa komite audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun, penelitian Waryanto (2010) menemukan hasil yang berbeda yaitu komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Perusahaan milik publik lebih mendapat tekanan untuk menyajikan informasi tambahan karena adanya tuntutan akuntabilitas dari beberapa pihak yang berkepentingan. Tuntutan tersebut mewajibkan adanya keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial sehingga mendorong terwujudnya pengungkapan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan adanya faktor kepemilikan publik, perusahaan harus menyajikan laporan tahunan perusahaan kepada publik untuk menjaga kepercayaan investor

publik terhadap perusahaan. Penelitian Khan, *et.al.* (2012) menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun, berbeda dengan penelitian Putra (2011) yang menjelaskan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Tekanan dalam pengungkapan CSR secara umum lebih tinggi bila dibandingkan dengan investor asing, terkait dengan pemisahan antara manajemen dan pemilik perusahaan, yang dimana proporsi kepemilikan sahamnya lebih tinggi. Investor asing cenderung memiliki nilai dan pengetahuan yang berbeda karena perbedaan lingkup pasar asing dengan lokal. Selain itu, perusahaan berbasis asing memiliki teknologi yang cukup, *skill* karyawan yang baik, jaringan informasi yang luas sehingga memungkinkan untuk melakukan *disclosure* yang luas. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan asing diharapkan dapat mengungkapkan lebih banyak informasi termasuk informasi sosial dan lingkungan untuk membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Penelitian oleh Haniffa dan Cooke (2005) dalam Khan, *et.al.* (2012) menemukan bukti bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan asing dan luas pengungkapan CSR. Namun, hasil penelitian Amran dan Devi (2008) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Dalam penelitian Khan, *et.al.* (2012), terdapat variabel CEO *duality* yang tidak digunakan dalam penelitian ini. CEO *duality* merupakan jabatan rangkap yang dipegang oleh satu orang, yaitu sebagai CEO dan sebagai *chairman*. Jabatan

*chairman* hanya ada pada model *one-tier board* yang condong pada model *corporate governance* yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon. Penelitian oleh Khan, *et.al.* (2012) dilakukan di Bangladesh, dimana negara tersebut merupakan negara persemakmuran Inggris yang menganut *one-tier board system*. Di Indonesia perusahaan menggunakan *two-tier board system* yang terdiri dari dua dewan, yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam sistem pengawasan ini terdapat pemisahan jabatan antara dewan komisaris yang bertugas sebagai pengawas dan dewan direksi yang bertugas sebagai eksekutif dalam perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Khan, *et.al.* (2012) untuk menguji hubungan antara karakteristik *corporate governance* dan pengungkapan CSR. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 karena perusahaan manufaktur lebih banyak memberikan dampak/pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Penelitian ini juga menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai indeks pengungkapan CSR dengan pertimbangan bahwa GRI merupakan indeks pengungkapan yang telah digunakan secara internasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penerapan GCG dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan karena adanya salah satu prinsip GCG yaitu *responsibility*. Prinsip *responsibility* ditekankan oleh perusahaan pada kepentingan *stakeholders*

dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Praktik pengungkapan CSR berperan penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan karena perusahaan beroperasi di lingkungan masyarakat dan aktivitasnya memiliki dampak bagi sekitarnya. Adanya tekanan dari masyarakat dan beberapa pihak yang berkepentingan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi CSR secara lebih banyak dan rinci. Oleh karena itu, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap luas tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap luas tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Apakah kepemilikan publik berpengaruh luas terhadap tanggung jawab sosial perusahaan?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap luas tanggung jawab sosial perusahaan?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
2. Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
3. Pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
4. Pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain :

1. Memberikan pemahaman mengenai karakteristik *corporate governance* dan pengaruhnya terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan tentang manfaat penerapan dan mekanisme *Good Corporate Governance* dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan bagi perusahaan.
3. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dan lembaga-lembaga penyusun standar akuntansi dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka yang dilakukan. Bab ini berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian. Bab ini juga berisi kerangka pemikiran dan penelitian dan hubungan antar variabel dependen dan independen yang disajikan dalam hipotesis penelitian.

Bab ketiga berisi metode penelitian. Bab ini berisi deskripsi variabel penelitian dan operasional penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat berisi hasil dan pembahasan. Bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, analisis data dengan alat teknik analisis yang digunakan, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima berisi penutup yang berisi simpulan tentang hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan (*agency theory*) berkaitan dengan hubungan kontrak antara anggota dalam suatu perusahaan. Teori agensi menyediakan premis teoritis untuk memahami proses organisasional dan desain dari perspektif *principal-agent* (Subramaniam, 2006 dalam Mulia, 2009). Hubungan *agency* adalah suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Eisenhardt (1989) dalam Waryanto (2010) menggunakan tiga sifat asumsi dasar manusia guna menjelaskan teori agensi, yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal sehingga memicu biaya keagenan. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (Hendriksen dan Van Breda, 2000 dalam Untoro, 2013).

Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba (*earnings management*) mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik (pemegang saham). Manajer akan berusaha untuk melakukan hal tersebut untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan pemilik atau pemegang saham. Adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi ini menimbulkan biaya keagenan yang harus ditanggung perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), biaya keagenan dibagi dalam tiga jenis yaitu :

1. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen (*monitoring cost*).

2. Biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak merugikan prinsipal, atau dengan kata lain untuk meyakinkan agen bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut (*bondling cost*).
3. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal akibat dari perbedaan kepentingan (*residual loss*).

Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan (Ibrahim, 2007 dalam Waryanto, 2010). Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan GCG diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham) dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa manajemen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan manajemen sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan.

### **2.1.2 Teori Legitimasi**

Menurut Ghazali dan Chariri (2007), yang melandasi teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi organisasi dapat dilihat

sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Khan, *et.al.* (2012) menjelaskan bahwa teori legitimasi biasanya digunakan untuk menjelaskan motivasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Khan (2012) juga menambahkan motivasi perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan dukungan dari *stakeholder* dan bisa melanjutkan aktivitasnya selama organisasi memberikan manfaat dan tidak berbahaya seperti mengelola limbah berbahaya, mengurangi dampak polusi, dan menyejahterakan warga sekitar pabrik. Apabila perusahaan melakukan pengungkapan sosial, maka perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya mendapatkan “status” dari masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi atau dapat dikatakan terlegitimasi. Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat (Ulman, 1982 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Ketika manajer merasa bahwa operasi perusahaan tidak sesuai lagi dengan kontrak sosial, maka upaya perbaikan perlu dilakukan agar perusahaan tetap memiliki “kontrak” tersebut dengan cara mengubah persepsi dan pandangan dari masyarakat. Pengungkapan merupakan cara yang tepat untuk mengubah persepsi dan pandangan-pandangan tersebut. Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi (Mahdiyah, 2008 dalam Paramita, 2013).

### 2.1.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Waryanto, 2010).

Pengertian lain menurut *World Business Council for Sustainable Development States* (WBCSD), CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya.

*“CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of live of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.”*

Penerapan CSR dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham (*shareholders*), tapi juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan karena CSR merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang (Rosmasita, 2007 dalam Paramita, 2013). Menurut Rosmasita (2007) dalam Paramita (2013), tujuan CSR adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.
2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial.
3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor.

#### **2.1.4 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Ghozali dan Chariri (2007) mendefinisikan pengungkapan sosial dan lingkungan sebagai proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Hal senada juga diungkapkan oleh Hackston dan Milne (1996) dalam Said, *et.al.* (2009) dimana pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai penyediaan informasi finansial dan nonfinansial yang berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan lingkungan sosial dan fisik organisasi tersebut, yang dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial yang terpisah.

Kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi antara lain adalah pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyarankan kepada perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai

sosial dan lingkungan, sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) Paragraf kesembilan:

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Secara yuridis formal, pemerintah telah mendukung praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2(c) dan Bab V Pasal 74. Pada Pasal 66 ayat 2 bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas No.47 Tahun 2012 pasal 2,3,5 dan pasal 6 yang mengatur perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungannya ke dalam laporan tahunan.

Saat ini *sustainability report* perusahaan-perusahaan hampir di seluruh dunia disusun dengan menggunakan standar pelaporan yang diusulkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia juga merujuk kepada standar yang dikembangkan oleh GRI. Dalam standar pelaporannya GRI memperhatikan tiga indikator/aspek, yaitu indikator ekonomi/keuangan, indikator lingkungan, dan indikator sosial. Indikator sosial terdiri dari empat indikator, yaitu hak asasi manusia, masyarakat, tenaga kerja, dan pertanggungjawaban produk.

#### **2.1.5 Tata Kelola Perusahaan**

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *corporate governance* didefinisikan sebagai berikut:

*“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders.”*

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan *corporate governance* adalah untuk mengendalikan dan mengarahkan perusahaan agar dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan dengan baik.

Claessens (2003) dalam Khan (2010) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan adalah usaha untuk menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial atau antara tujuan individu dan tujuan kelompok. Maier (2005) dalam Khan (2010) juga menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan manajemen perusahaan, dewan komisaris, penanam saham, dan *stakeholder* lainnya. Menurut Khan (2010), tata kelola perusahaan adalah proses para dewan dan auditor mengelola tanggung jawab mereka kepada penanam modal dan *stakeholder* lain. Untuk penanam modal, tata kelola perusahaan digunakan untuk menambah kepercayaan akan pengembalian yang sesuai dari investasi mereka. Untuk *stakeholder* perusahaan lain, tata kelola perusahaan akan memberikan jaminan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan karena keberadaan perusahaan itu.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mengeluarkan Pedoman Umum GCG untuk dijadikan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Pedoman Umum GCG menyebutkan asas-asas *Good Corporate Governance*. Asas-asas tersebut adalah:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang harus disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

## 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

## 4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

## 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* telah banyak dilakukan. Penelitian ini telah dilaksanakan baik di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Hasil penelitiannya pun bervariasi. Berikut ini akan dijelaskan penelitian-penelitian terdahulu mengenai karakteristik *corporate governance* dan luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

#### 1. Penelitian Roshima Said, Yuserrie Hj Zainuddin, dan Hasnah Haron (2009)

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap luas pengungkapan CSR di Malaysia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan pemerintah dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

#### 2. Penelitian Md. Habib-Uz-Zaman Khan (2010)

Penelitian ini menguji pengaruh elemen-elemen *corporate governance* terhadap pelaporan CSR pada bank-bank komersial di Bangladesh. Hasil penelitian Khan

menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan proporsi pihak asing dalam dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pelaporan CSR, sedangkan proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak berpengaruh.

### **3. Penelitian Chintya Fadila Laksmitaningrum (2010)**

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan CSR. Penelitian tersebut membuktikan bahwa profitabilitas, likuiditas, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

### **4. Penelitian Riha Dedi Priantana dan Ade Yustian (2011)**

Penelitian ini menguji pengaruh struktur *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan CSR. Penelitian Riha memberikan bukti bahwa ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh.

### **5. Penelitian Arifur Khan, Mohammad Badrul Mutakkin, dan Javed Siddiqui (2012)**

Penelitian ini menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR di Bangladesh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komisaris independen,

komite audit, kepemilikan publik, dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>PENELITI (TAHUN)</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>VARIABEL DEPENDEN</b>	<b>VARIABEL INDEPENDEN</b>	<b>HASIL</b>
1	Roshima Said, Yuserrie Hj Zainuddin dan Hasnah Haron (2009)	Regresi berganda	<i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	<i>Board size, board independence, CEO duality, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah</i>	Kepemilikan pemerintah, konsentrasi kepemilikan, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.
2	Md. Habib-Uz-Zaman Khan (2010)	Regresi berganda	<i>Corporate Social Responsibility Reporting</i>	<b>Independen:</b> Proporsi dewan komisaris independen, proporsi dewan direksi perempuan, proporsi dewan direksi asing  <b>Kontrol:</b> <i>leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan</i>	Keberadaan proporsi dewan direksi asing dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pelaporan CSR.

3	Chintya Fadila Laksmitaningrum (2010)	Regresi berganda	Luas pengungkapan CSR	Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage, size,</i> ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing	Profitabilitas, likuiditas, ukuran dewan komisaris, dan struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.
4	Riha Dedi Priantana dan Ade Yustian (2011)	Regresi berganda	Luas pengungkapan CSR	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran dewan komisaris, dan komposisi dewan komisaris	Ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR.
5	Arifur Khan, Mohammad Badrul Muttakin, dan Javed Siddiqui (2012)	Regresi berganda	<i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	<i>Managerial ownership, public ownership, foreign ownership, board independence, role duality, and audit committees</i>	Kepemilikan publik, kepemilikan asing, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

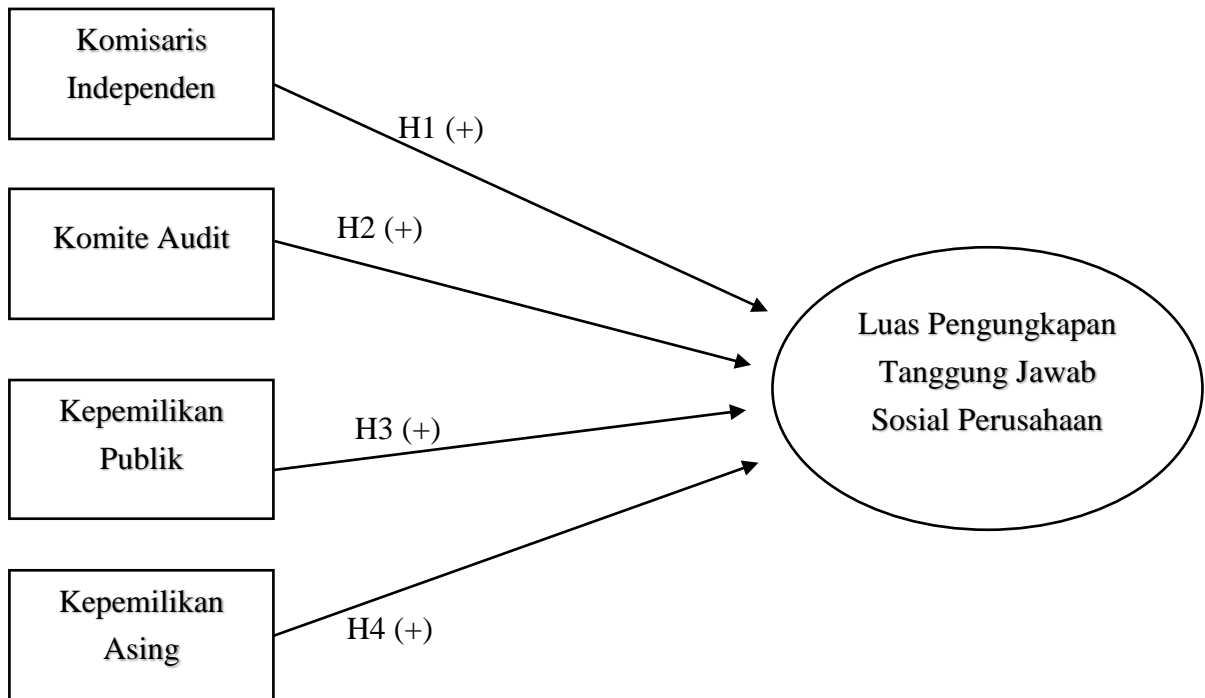
*Sumber : penelitian-penelitian sebelumnya*

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Praktik pengungkapan CSR memiliki peran penting bagi perusahaan karena perusahaan beroperasi di lingkungan masyarakat dan kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak terhadap masyarakat tersebut. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan salah satu asas *good corporate governance* yaitu *responsibility*. *Good Corporate Governance* dan CSR di Indonesia diatur dalam Pedoman Umum GCG dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Banyak faktor yang memengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan CSR ke dalam *annual report* perusahaan. Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan karakteristik *corporate governance* berupa komisaris independen, komite audit, kepemilikan publik, dan kepemilikan asing sebagai variabel independen penelitian yang memengaruhi luas pengungkapan CSR sebagai variabel dependen penelitian.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan CSR

Berdasarkan teori agensi, dengan melaporkan laporan keuangan yang lengkap maka setidaknya manajemen dapat mengurangi masalah keagenan yang sering muncul dalam hubungan prinsipal-agen. Dengan demikian, komisaris independen sebagai pihak eksternal yang bertugas mengawasi manajemen dapat memengaruhi luasnya pengungkapan CSR.

Menurut peraturan Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memiliki sekurang-kurangnya 30% dari Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi, yaitu pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan para pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Komisaris independen bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyediakan saran kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan melakukan praktik tata kelola perusahaan. KNKG juga menjelaskan bahwa komisaris independen mempunyai tugas untuk menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya komisaris independen, pengelolaan perusahaan akan lebih efektif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila komisaris independen menjalankan perannya dengan efektif, maka pengelolaan perusahaan akan semakin baik dan mendorong pengungkapan CSR secara lebih luas. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.**

### **2.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Berdasarkan teori agensi, tata kelola perusahaan menyediakan kerangka pengendalian internal yang dapat mengurangi masalah keagenan. Komite audit yang berperan dalam pengendalian internal perusahaan dianggap mampu mengatasi masalah keagenan karena adanya pengawasan intensif terhadap perilaku manajemen yang oportunistik dan kecenderungan menutup-nutupi informasi untuk kepentingan sendiri (Mulia, 2010).

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 yang tertuang dalam Peraturan Nomor IX.I.5 Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelola perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memiliki komite audit minimal terdiri dari 3 orang. KNKG dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia menjelaskan bahwa salah satu fungsi komite audit sebagai bagian dalam perusahaan adalah membantu dewan komisaris memastikan struktur pengendalian internal sudah cukup dan efektif. Berdasarkan tugas tersebut, keberadaan komite audit dapat dianggap sebagai indikator pengawasan kualitas tinggi dan berpengaruh dalam menyediakan informasi lebih kepada pemakai laporan keuangan. Apabila komite audit menjalankan tugasnya dengan efektif, maka proses pengawasan dapat berjalan dengan baik dan mendorong pengungkapan CSR semakin lebih luas. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H2 : Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.**

### **2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat. Untuk bisa melanjutkan kegiatan operasionalnya, perusahaan perlu dukungan dari masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengungkapkan informasi pengungkapan sosialnya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Perbedaan proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat memengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Khan, *et.al.* (2012) mengungkapkan bahwa ketika suatu perusahaan mulai *go public*, maka secara langsung akuntabilitasnya terhadap publik menjadi sangat penting. Adanya kepemilikan saham oleh masyarakat umum akan memberikan tekanan terhadap perusahaan untuk mengungkapkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan *visibility* dan *accountability* perusahaan terhadap sejumlah besar *stakeholder*. Sobhan dan Werner (2003) dalam Khan, *et.al.* (2012) beralasan bahwa biasanya publik kurang mengerti tentang laporan keuangan dan hanya mencari insentif yang jelas seperti dividen sehingga kebanyakan tidak datang saat rapat umum pemegang saham. Oleh karena itu, semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, maka akan semakin banyak pula detail informasi yang diminta dan

dengan demikian pengungkapan akan semakin meluas. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H3 : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.**

#### **2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan multinasional atau perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak asing melihat keuntungan legitimasi berasal dari pihak-pihak berkepentingan berdasarkan atas *home market* yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka waktu panjang (Suchman, 1995 dalam Barkemeyer, 2007).

Perusahaan dengan kepemilikan saham asing biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi karena alasan hambatan geografis dan bahasa (*space and language*). Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas (Xiao, *et.al.*, 2004 dalam Huafang dan Jianguo, 2007). Selain itu, perusahaan yang memiliki kontrak dengan investor asing diduga akan lebih *concern* terhadap praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR).

Menurut Susanto (1992) dalam Waryanto (2010), ada beberapa alasan mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan asing cenderung memberi pengungkapan yang lebih luas antara lain: (1) perusahaan asing terutama dari Eropa

dan Amerika lebih lama mengenal konsep praktik dan pengungkapan CSR, (2) perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri, (3) perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk, dan (4) kemungkinan permintaan pasar yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Dengan demikian, semakin besar kepemilikan saham pihak asing dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan tanggung jawab sosialnya akan semakin luas juga. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H4 : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

##### 3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilihat dari *annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan ini diukur dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan dalam GRI versi 3.0 yang meliputi 79 item pengungkapan yaitu : *economic, environment, labour practices, human rights, society, dan product responsibility*.

Metode yang digunakan untuk mengukur indeks yang telah dibentuk tersebut adalah dengan cara *content analysis* yaitu nilai 1 untuk setiap *item* yang diungkapkan serta 0 untuk *item* yang tidak diungkapkan dalam kategori-kategori yang telah ditentukan *Global Reporting Initiative* (GRI). Perhitungan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPCSR = \frac{\text{Jumlah skor item pengungkapan yang diungkapkan}}{79}$$

Keterangan :

IPCSR : Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

### **3.1.2 Variabel Independen**

#### **3.1.2.1 Komisaris Independen**

KNKG dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia memberikan definisi komisaris yaitu bagian dalam perusahaan yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyediakan saran kepada dewan direksi dan memastikan perusahaan melaksanakan praktik tata kelola perusahaan. Komisaris independen tidak boleh mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri. Khan, et.al. (2012) menyatakan bahwa komisaris independen mempunyai tujuan untuk memperkuat jajaran komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan. Dewan komisaris independen diukur dari proporsi jumlah komisaris independen terhadap total komisaris yang ada di perusahaan, seperti dalam penelitian Khan (2012).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Total komisaris independen}}{\text{Total komisaris}}$$

### 3.1.2.2 Komite Audit

Komite audit berperan penting dalam meningkatkan standar tata kelola perusahaan. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. KNKG dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia memberikan penjelasan bahwa salah satu fungsi komite audit sebagai bagian dalam perusahaan adalah membantu dewan komisaris memastikan struktur pengendalian internal sudah cukup dan efektif.

Komite audit diukur dengan cara menghitung banyaknya anggota komite audit perusahaan yang dilakukan perusahaan.

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah seluruh anggota komite audit}$$

### 3.1.2.3 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik diukur dari prosentase saham yang dimiliki oleh publik dengan total saham yang diterbitkan, seperti dalam penelitian (Khan, et.al. 2012).

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki publik}}{\text{Total saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

### 3.1.2.4 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak perorangan, badan, pemerintah, serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri.

Kepemilikan asing diukur dari prosentase saham yang dimiliki oleh pihak asing dengan total saham yang diterbitkan, seperti dalam penelitian Said, et.al. (2009).

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki asing}}{\text{Total saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Pemilihan sampel perusahaan manufaktur yang diambil dari Bursa Efek Indonesia karena laporan tahunan perusahaan manufaktur mudah didapat dan paling banyak terdaftar di BEI. Alasan lainnya adalah perusahaan manufaktur merupakan industri yang memberikan dampak/pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menerbitkan laporan tahunannya selama periode 2011-2013.
2. Perusahaan yang menyajikan laporan informasi tanggung jawab sosial di dalam laporan tahunannya.
3. Memiliki data yang lengkap berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber data yang akan digunakan merupakan data publikasi yang berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) atau situs resmi perusahaan. Sumber data tersebut diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Diponegoro, situs resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dan situs resmi perusahaan.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Data dan dokumen-dokumen tersebut merupakan laporan tahunan yang diperoleh dari Pojok BEI Universitas Diponegoro, website BEI, dan situs resmi perusahaan.

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif memberikan informasi umum mengenai data yang akan diuji dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah *mean*, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengertian regresi berganda dapat dilakukan setelah model penelitian memenuhi asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, bebas dari multikolonieritas, bebas dari heteroskedastisitas, dan bebas dari autokorelasi.

#### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2012). Menurut Ghozali (2012) ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu analisis grafik dan uji statistik.

Uji normalitas pada penelitian ini didasarkan pada analisis grafik dan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Sementara itu uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H0 : data residual terdistribusi normal

H1 : data residual tidak terdistribusi normal

Dalam mengambil keputusan dilihat dari hasil uji K-S, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

### **3.5.2.2 Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2012). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cutoff* yang umum digunakan adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan  $VIF \geq 10$ . Jika nilai *tolerance*  $\geq 0,1$  atau sama dengan nilai  $VIF \leq 10$  maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel dalam model regresi.

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2012). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda, maka model tersebut terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat dilihat dengan menggunakan grafik *scatterplot*.

Selain uji grafik, uji heteroskedastisitas dapat diuji dengan menggunakan metode statistik berupa uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika probabilitas signifikansinya  $> 0,05$  maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

### 3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dapat disimpulkan terjadi problem autokorelasi (Ghozali, 2012). Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin-Watson (*DW test*). Jika  $dl < d < 4 - dl$  maka  $H_0$  diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.

### 3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012). Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IPCSR = \alpha + \beta_1 KIN + \beta_2 KAU + \beta_3 PUB + \beta_4 FOR + \varepsilon$$

Keterangan:

IPCSR : Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien regresi

KIN : Komisaris Independen

KAU : Komite Audit

PUB : Kepemilikan Publik

FOR : Kepemilikan Asing

$\varepsilon$  : *Error*

### 3.5.4 Uji Hipotesis

#### 3.5.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2012).

#### 3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak yang berarti secara bersama-sama semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas, atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika t hitung lebih besar dari t tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\text{sig} \leq 0,05$ ) maka hipotesis diterima, artinya suatu variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen.
2. Jika t hitung lebih kecil dari t tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\text{sig} > 0,05$ ) maka hipotesis ditolak, artinya suatu variabel independen secara individual tidak memengaruhi variabel dependen.